

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Jamu Pepen Makan Siang

- Polemik Sampah Berakhir dengan Tawa
- Proposal Hibah Rp 2 Triliun Diganti Rp 1 Triliun

Gambir, Warta Kota

Setelah beberapa hari terlibat polemik di media terkait pembuangan sampah di Bantar Gebang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bertemu di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Usai bertemu, mereka tampak tersenyum lebar. Keduanya juga sempat berpose salam komando di depan wartawan. Tak ada ketegangan sama sekali.

Rahmat Effendi mengaku, dalam pertemuan kemarin, ia dijamu makan siang oleh Anies Baswedan. "Atas nama Pemerintah Kota Bekasi, warga Kota Bekasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur. Bahkan setelah itupun kami dijamu makan," kata pria yang akrab dipanggil Pepen itu.

"Jadi tadi baru makan sebentar, gizi kami sudah meningkat," tambah Pepen sambil tertawa lebar.

Anies pun menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wali Kota Bekasi beserta jajaran untuk mengklarifikasi berita yang akhir-akhir ini ramai di media massa.

"Jadi Pak Wali dan seluruh jajaran, kami dari Pemprov DKI ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kebaikan hati Pak Wali, atas perkenannya untuk silaturahmi pada hari ini," katanya.

Bahkan Anies berjanji akan ganti berkunjung ke Bekasi dalam waktu dekat. Bukan hanya membahas kerja sama DKI dan Bekasi, namun juga untuk memperkuat silaturahmi antar-dua wilayah itu.

"Inshaallah kami bergiliran nanti ke tempat Pak Wali dan seluruh jajaran. Nanti katanya

mau dijamu juga di sana. Kita terus perkuat silaturahmi. Istilah kami tadi bukan hanya kerja sama tapi persaudaraan di antara kita semua," ujar Anies sambil tersenyum.

Komitmen tak berubah

Anies mengatakan, tidak ada yang berubah terkait komitmen kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemerintah Kota Bekasi. Dia mengatakan, pada dasarnya pembangunan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur saling terkait.

"Justru kita ingin agar pembangunan Jabodetabekjur itu dibangun dalam sebuah semangat integrasi karena perekonomian di wilayah ini (Jakarta), terintegrasi, kerjanya pun terintegrasi," ucapnya.

Anies mengatakan, dalam pertemuan kemarin, Rahmat Effendi bercerita kepadanya bahwa persentase warga Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta pada pagi hari cukup besar. Mereka baru pulang ke Kota Bekasi pada malam hari.

"Sama saja, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bekasi tercatat kantornya di Jakarta. Jadi integrasi itu tinggi," ujar Anies.

Perbaiki lingkungan

Sedangkan Pepen mengatakan, dana kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi merupakan bagian dari integrasi itu. Apalagi, ada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta di Kota Bekasi.

Pepen mengatakan, bantuan keuangan, dari dari Pemprov DKI digunakan untuk perbaikan lingkungan dan sarana lain untuk warga di sekitar TPST Bantargebang.

"Bagaimana membangun

daerah itu supaya kalau jalan di DKI rasanya A, di Kota Bekasi A juga," katanya.

Miskomunikasi

Mengenai polemik yang terjadi beberapa hari terakhir, Pepen menyebut masalahnya hanya miskomunikasi. "Beberapa hari ini terjadi miskomunikasi antara Bekasi dan DKI, dan hari ini ternyata tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI berkenaan dengan hubungan kedaerahan kemitraan yang dibangun dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantar Gebang," ujarnya.

Pepen mengaku lega karena komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap Pemkot Bekasi tetap sama. Dia mengaku beberapa bulan ini pihaknya sulit menghubungi Pemprov DKI setelah Anies menjabat.

Namun, ternyata beberapa hari lalu Anies sudah mencoba menghubunginya. Telepon dari Anies tidak terangkat Pepen. Ia tidak tahu bahwa Anies menghubunginya. Akhirnya, masalah sampah dan dana hibah ini jadi berlarut-larut. Namun, kemarin, masalah itu terklarifikasi.

"Alhamdulillah saya juga sudah dapat nomor gubernur. Kapan saja saya bisa komunikasi dan kapan saja hal-hal yang berkenaan dengan sinergi komunikasi kemitraan maupun kerja sama bisa kita selesaikan," kata Pepen.

Tarik proposal

Sebelumnya, di kantor Pemkot Bekasi, kemarin, Pepen menjelaskan mengenai proposal dana hibah kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi ke DKI.

Pepen menyatakan bahwa pihaknya akan menarik proposal senilai Rp 2,09 triliun yang telah diajukan ke

Pemprov DKI pada 15 Oktober 2018 lalu. Bekasi akan mengganti proposal itu dengan proposal yang pernah diajukan bulan Mei 2018 yang nilainya sekitar Rp 1 triliun.

"Yang terakhir, yang (diajukan) itu, memang ada. Ini yang akan kami cabut. Yang mau kami pakai adalah surat Pak Ruddy (Penjabat Wali Kota Bekasi), bulan Mei (pengajuannya) ada dua surat. Ada Rp 426 miliar dan Rp 500 miliar. Jadi sekitar Rp 1 triliun. Ini yang kami evaluasi," katanya.

Imbauan Mendagri

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi anggaran pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Mendagri saat mengomentari empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Dalam penjelasannya, Tjahjo juga sempat menyinggung anggaran di Pemprov DKI Jakarta. "Selama empat tahun kami punya kewenangan mengevaluasi anggaran, semua berjalan dengan baik karena memang awalnya saja 2015 penyerapannya kecil, tetapi setelah itu sudah mulai bagus," ujar Tjahjo di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (22/10).

"Kayak DKI Jakarta kami akan mengoreksi sihwa anggaran DKI tolong sisihkan anggaran APBD atau PAD untuk Bekasi terkait masalah sampah, untuk Tangerang dan Depok, untuk mengurangi masalah kemacetan, masalah banjir, dan sebagainya," katanya.

Namun Tjahjo tidak menjelaskan lebih lanjut atas pernyataannya itu. (m16/Kompas.com)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Jamu Pepen Makan Siang

Perjalanan Pengajuan Dana Hibah Kemitraan

1 Februari 2018

Awalnya, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi menggelar pertemuan. Pemkot Bekasi meminta bantuan kemitraan.

2 Mei 2018

Pemkot Bekasi mengirimkan surat pengajuan dana kemitraan, untuk pengerjaan beberapa proyek. Namun, menurut Gubernur DKI Anies Baswedan, proposal itu tidak memuat rincian anggaran. DKI mengembalikan proposal itu dan meminta dilengkapi.

3 15 Oktober 2018

Pemkot Bekasi mengajukan proposal (proyek) flyover Cipendawa, flyover Rawa Panjang, dan Jalan Siliwangi, dan lainnya. Besarnya Rp 2,09 triliun.

4 17 Oktober 2018

Tim koordinasi bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta mengecek lapangan tentang progres pembangunan infrastruktur yang anggarannya kembali diajukan. Pemprov DKI juga meminta rencana anggaran biaya (RAB) penggunaan dana hibah.

Rincian Peruntukan Dana Hibah

Proyek fly over Cipendawa, Bekasi



6 22 Oktober 2018

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya akan menarik proposal dana hibah senilai Rp 2,09 triliun yang telah diajukan pada 15 Oktober, dan akan menggantinya dengan proposal yang pernah diajukan Mei 2018 yang nilainya sekitar Rp 1 triliun.

5 18 Oktober 2018

Dikirimkan lagi e-mail ke Pemprov DKI Jakarta. Disebutkan, dana kemitraan akan digunakan untuk dua bidang, yakni bidang bina marga dan bidang sumber daya air.

Bidang Bina Marga

- Lanjutan pembangunan flyover Rawapanjang Rp 188,7 miliar.
- Lanjutan pembangunan flyover Cipendawa Rp 372,7 miliar.
- Lanjutan penataan dan pembangunan pedestrian Jalan Siliwangi Rp 1,3 triliun.

• Penataan pedestrian dan pelebaran Jalan Curug Rp 72,7 miliar.

• Penataan pedestrian dan pelebaran Jalan Kapin Rp 120,8 miliar.

Bidang Sumber Daya Air

• Pembangunan crossing Buaran Rp 16,4 miliar.

Truk Tak Lewat Jalan Ahmad Yani Lagi

Bekasi, Warta Kota

Pemerintah Kota Bekasi kembali memperketat aturan jam operasional kendaraan truk sampah DKI Jakarta yang menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Rute truk yang melewati Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, tidak bisa lagi dilintasi sepenuhnya selama 24 jam. Hanya truk sampah DKI jenis compactor (yang tertutup) yang boleh 24 jam. Selebihnya, truk jenis lainnya, hanya boleh melintas pada pukul 21.00 malam hingga 05.00 pagi.

Hanya di jam itu truk-truk pengangkut sampah bisa melewati rute Jakarta-keluar Tol Bekasi Barat-Jalan Ahmad Yani-Jalan Raya Narogong-

TPST Bantar Gebang.

Adapun dua rute yang lain, yakni jalur Cibubur dan jalur Jatiasih tetap bisa dilintasi 24 jam. Jalur Cibubur melewati rute Jakarta-Jalan Transyogi Cibubur-Jalan Raya Narogong-TPST Bantar Gebang. Sedangkan jalur Jatiasih melewati rute Jakarta-keluar Tol Jatiasih-Jalan Cipendawa-Jalan Raya Narogong-TPST Bantar Gebang.

Aneh

Pantauan Warta Kota, Senin (22/10) siang, Jalan Ahmad Yani, Bekasi, sudah tidak dilintasi truk sampah DKI Jakarta. Kondisi itu terlihat baik dari arah Jalan Sudirman Kranji (dari Pulogadung, Jakarta Timur), maupun dari pintu keluar Tol

Bekasi Barat. Padahal sebelumnya, truk sampah kerap kali melintasi jalan tersebut.

Jamroni, petugas penyapu jalan Kota Bekasi, mengungkapkan bahwa empat hari terakhir Jalan Ahmad Yani sudah jarang dilintasi truk sampah DKI Jakarta. Bahkan dua hari terakhir tak terlihat lagi di siang hari.

"Iya sudah jarang lewat. Ini dua hari saya nyapu tidak lihat lagi," ujarnya kepada Warta Kota, Senin (22/10).

"Memang kenapa ini ya, aneh sepi gini. Biasanya mah ramai yang lewat, sampai air licit-nya itu berceceran di jalan dan bau gitu. Empat hari ini saya baru lihat satu truk sampah, itu juga yang ada tutupnya," tambahnya. (m18)